

**Dampak Pemekaran Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
(Studi Kasus di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang
Mongondow)****Betania P.R. Rondonuwu¹****Herman Nayoan²****Johnly Pangemanan³***Email Korespondensi:* taniarondonuwu84@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran Desa Pusian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemekaran desa yang terjadi pada tahun 2012 membagi Desa Pusian menjadi tiga wilayah administratif, yaitu Pusian Induk, Pusian Barat, dan Pusian Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran desa memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini terlihat dari meningkatnya aksesibilitas layanan, kecepatan pelayanan administrasi, serta kedekatan antara masyarakat dan aparat desa. Selain itu, pemekaran mendorong peningkatan pada aspek daya tanggap (*responsiveness*), keandalan (*reliability*), serta empati (*empathy*) aparatur desa dalam melayani masyarakat. Dari segi sarana dan prasarana (*tangibles*), terjadi perbaikan fasilitas pelayanan di masing-masing desa. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa dampak negatif, seperti belum meratanya pembangunan infrastruktur antar desa, keterbatasan sumber daya manusia, serta masih kurangnya koordinasi antar pemerintah desa, khususnya dalam aspek keamanan dan pengelolaan konflik sosial. Selain itu, pembagian dana desa yang sama meskipun jumlah penduduk berbeda menyebabkan ketimpangan pembangunan. Secara keseluruhan, pemekaran desa di Pusian telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun masih diperlukan peningkatan koordinasi, pemerataan pembangunan, dan penguatan kapasitas aparatur desa agar manfaat pemekaran dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

Kata kunci : Pemekaran, Desa, Pelayanan, Publik, Kualitas

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Di Indonesia, pemekaran wilayah dilaksanakan ditingkat provinsi, kabupaten atau kota, meluas hingga kewilayah desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan publik agar pemerintah dapat mempersingkat dan menyederhanakannya bagi orang-orang yang dilayaninya. Hal ini akan memungkinkan proses pelayanan publik bisa terlaksana dengan efisien serta efektif yang mampu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. (Sapara and Eprilianto 2024:728)

Desa pusian adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Seiring berjalannya waktu tepat pada tanggal 12 desember 2012 Desa Pusian dimekarkan terbagi menjadi tiga desa.

Tujuan pemekaran yakni supaya wilayah yang lebih kecil dapat lebih mudah dikelola dan diawasi, serta untuk mengurangi potensi terjadinya konflik antar warga. Pemerintah desa dan masyarakat berharap dengan adanya tiga kepala desa yang memimpin masing-masing wilayah hasil pemekaran, komunikasi dan koordinasi dapat terjalin dengan lebih baik. Selain itu, diharapkan juga dapat dibentuk perangkat keamanan ditingkat desa, seperti satuan perlindungan masyarakat (Linmas), serta didirikan pos keamanan lingkungan (pos kamling) disetiap dusun. Hal tersebut harapannya dapat membangun rasa aman serta nyaman untuk semua masyarakat. Konflik yang sering terjadi didesa pusian induk, pusian barat dan pusian selatan pada umumnya berupa pertikaian yang

dipicu oleh kesalah pahaman dikalangan masyarakat, terutama pemuda yang berdampak pada kerusakan fasilitas milik pemerintah ditambah dengan pembangunan infrastruktur yang tidak merata yang terjadi pada ketiga desa hasil pemekaran karena dana desa yang setiap desa terima memiliki nilai yang sama. Namun, perbedaan jumlah penduduk disetiap desa menyebabkan ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, dana desa yang masuk lebih banyak difokuskan pada perbaikan infrastruktur yang rusak akibat konflik antar warga, dimana kerusakan tersebut disebabkan oleh tindakan masyarakat saat terjadinya pertikaian. Hal ini mengakibatkan pembangunan lainnya menjadi terabaikan dan ketimpangan antar wilayah semakin terasa.

Meski demikian, perubahan yang dilakukan melalui kebijakan pemekaran desa ini mendapat sambutan yang positif serta dukungan dari masyarakat. Warga berharap pemekaran ini dapat menjadi langkah awal menuju pemerataan pembangunan, peningkatan keamanan, serta terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat diketiga desa atas dasar dukungan tersebut, pemerintah desa segera mengambil langkah-langkah yang strategis untuk mempercepat berbagai proses perubahan. Secara administratif, desa pusian terbagi kedalam tiga wilayah, yakni pusian induk, pusian barat, dan pusian selatan. Dengan jumlah penduduk didesa pusian induk tercatat sebanyak 1.794 jiwa, didesa pusian

barat sebanyak 629 jiwa dan didesa pusian selatan berjumlah 937 jiwa.

Pemekaran desa pusian dilakukan melalui beberapa tahapan, dengan perencanaan yang matang dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui musyawarah desa serta dukungan dari pemerintah daerah, proses pemekaran mulai diwujudkan dengan membentuk lembaga pemerintahan baru yang fokus pada pengelolaan sumber daya lokal dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Proses tersebut memperoleh dukungan dari beragam pihak, tak terkecuali lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna yang ada didesa Pusian Induk, Pusian Barat, dan Pusian Selatan Kecamatan Dumoga.

Pemekaran desa pusian ialah langkah strategis terkait upaya peningkatan kualitas layanan publik serta mempercepat pembangunan ditingkat desa. Melalui pemekaran, pemerintahan yang lebih kecil serta terfokus akan lebih mudah dalam mengelolah sumber daya serta memberi layanan yang lebih optimal untuk masyarakat.

Pemekaran desa diharapkan memberikan dampak positif dalam pengelolaan sumber daya, mempercepat pelayanan, serta menangani permasalahan sosial secara lebih efektif. Salah satu manfaat yang paling dirasakan adalah peningkatan kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Melalui pemekaran, pemerintah desa yang baru punya kewenangan besar dalam mengelolah anggaran dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat difokuskan didesa

yang baru, terutama dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang semakin padat. Melalui pemekaran, setiap desa yang baru terbentuk dapat lebih optimal dalam membangun fasilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan warganya.

Pelayanan publik dikantor desa pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan sosial masyarakat. Namun, sebelum dan sesudah pemekaran desa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam kualitas dan akses pelayanan. Sebelum pemekaran, pelayanan cenderung lambat karena jumlah penduduk yang banyak, keterbatasan aparatur, serta jarak yang relatif jauh dari pusat pemerintahan desa. Sementara itu, setelah pemekaran, pelayanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan lebih fokus pada kebutuhan masyarakat setempat karena wilayah yang lebih kecil dan pemerintahan yang lebih dekat. Meskipun jenis pelayanan pada dasarnya tidak banyak berubah, pemekaran desa mendorong peningkatan efektivitas pelayanan serta membuka peluang pengembangan layanan tambahan, seperti program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan berbasis digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran desa berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ditingkat desa

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada dampak pemekaran dan juga kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat didesa pusian yang sudah menjadi tiga wilayah administratif. Kajian ini menggunakan kerangka teori Dampak Positif dan Dampak Negatif

Pemekaran yang dikemukakan Gorys Keraf yang dikutip oleh Soemarwoto (2009:35) dalam teori tersebut dampak positif muncul ketika suatu perubahan memberikan manfaat bagi manusia maupun lingkungannya sedangkan dampak negatif terjadi ketika perubahan menimbulkan kerugian bagi manusia atau lingkungannya. Dan teori kedua yaitu teori Pelayanan Publik (Public Service Theory) yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990). Dalam teori tersebut, kualitas pelayanan publik diartikan sebagai sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu : reduksi data (data

reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

1. *Tangibles* (Bukti fisik)

Pemekaran desa tidak hanya dipandang sebagai suatu perubahan administratif, tetapi juga harus dilihat dari dampak nyata yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Salah satu aspek penting dari pemekaran desa adalah adanya bukti fisik yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah dalam memekarkan suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui pemerataan pembangunan di wilayah desa baru maupun di wilayah desa induk.

Desa Pusian yang sebelumnya merupakan satu desa, kini telah dimekarkan menjadi tiga desa. Langkah ini diambil karena jumlah penduduk yang padat serta wilayah desa yang luas, sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan pemekaran. Melalui pemekaran tersebut, terbentuk tiga wilayah pemerintahan yang masing-masing dipimpin oleh kepala desa guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini wilayah Desa Pusian telah terbagi menjadi tiga desa, yaitu Pusian Induk, Pusian Barat, dan Pusian Selatan. Masing-masing desa kini menunjukkan perkembangan pembangunan di wilayahnya. Hal ini didukung oleh alokasi dana desa yang diterima setiap desa secara rutin setiap tahun. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan tersebut adalah pembangunan kantor desa yang baru di masing-masing wilayah, yang dirancang untuk menunjang aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain itu, setiap kantor desa telah dilengkapi dengan penyediaan ruang pelayanan yang nyaman bagi masyarakat, sehingga proses administrasi dapat berlangsung dengan lebih tertib dan efisien. Pengadaan sarana pendukung seperti komputer, jaringan internet, serta peralatan administrasi lainnya juga semakin mempermudah aparat desa dalam memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. Penataan ruang tunggu masyarakat yang lebih rapi dan layak turut memberikan kenyamanan bagi warga yang membutuhkan layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Adapun dampak dari pemekaran desa dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari sisi pelayanan publik, masyarakat menjadi lebih mudah mengakses layanan pemerintahan karena jarak yang lebih dekat dan proses yang lebih cepat. Dari sisi pembangunan, terjadi pemerataan infrastruktur dimasing-masing desa sehingga tidak terpusat pada satu wilayah saja.

2. *Reliability* (Keandalan)

Hasil dari pemekaran tidak hanya tentang pembangunan saja, tetapi juga berkaitan dengan kecepatan pemerintah dalam merespons keluhan serta kebutuhan masyarakat. Desa Pusian pada saat belum dimekarkan membuat pemerintah desa masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau proses pelayanan yang cenderung lambat, disebabkan oleh jumlah penduduk yang padat.

Setelah kebijakan pemerintah dilaksanakan melalui pemekaran Desa Pusian menjadi tiga desa, masing-masing pemerintah desa yang dipimpin

oleh kepala desa kini lebih mudah dalam mengontrol wilayah serta menindaklanjuti keluhan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih tepat waktu, dan penundaan pelayanan dapat diminimalkan karena setiap desa lebih fokus menangani permasalahan sesuai kondisi dan kebutuhan warganya. Selain itu, aparat desa kini mampu memberikan layanan sesuai prosedur yang berlaku, sehingga proses administrasi menjadi lebih tertib, minim kesalahan, dan pelayanan dapat dilakukan secara tepat waktu.

Adapun dampak dari pemekaran desa ini terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan publik, kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparat desa. Di samping itu, pemekaran juga mendorong efektivitas kinerja pemerintah desa, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pemekaran desa tidak hanya menghasilkan perubahan secara fisik, tetapi juga membawa perbaikan signifikan dalam sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa.

3. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Pemekaran desa juga berdampak pada peningkatan respons pemerintah desa dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Aparatur desa menjadi lebih cepat merespons kebutuhan warga dan tidak menunda layanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan tidak hanya dilakukan di kantor desa, tetapi juga dapat dilaksanakan secara langsung ke rumah aparat desa (sekretaris desa) dengan waktu penyelesaian maksimal 1 × 24 jam. Selain itu, waktu tunggu

pelayanan menjadi lebih singkat dan masyarakat semakin mudah menemui perangkat desa ketika membutuhkan bantuan atau informasi.

Pemanfaatan waktu pelayanan ini bertujuan untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah desa. Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti tanpa adanya penundaan, sehingga proses penyelesaian keluhan masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien oleh pemerintah desa. Aparat desa juga menunjukkan kesiapan dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang responsif sesuai kebutuhan masyarakat.

Adapun dampak dari pemekaran desa ini terlihat pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, terciptanya hubungan yang lebih dekat antara pemerintah desa dan warga, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa. Selain itu, pemekaran juga mendorong terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap kebutuhan dan permasalahan masyarakat dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat.

4. Assurance (Jaminan/Kepercayaan)

Teori ini menjelaskan bagaimana ketiga kepala desa di wilayah Pusian memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan laporan yang diterima, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemerintah Desa Pusian Induk, Pusian Barat, dan Pusian Selatan berkomitmen menyelesaikan keluhan masyarakat secepat mungkin agar masyarakat

tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama.

Setiap aparatur desa ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Aparat desa memiliki kompetensi dan keahlian dalam memberikan layanan, sehingga mampu bekerja secara profesional dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan jaminan kepastian waktu layanan, sehingga masyarakat memperoleh kejelasan terkait proses dan penyelesaian administrasi. Dalam pelaksanaannya, aparatur desa turut memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum kepada warga, khususnya dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan ranah hukum. Aparatur desa juga merespons secara cepat setiap keluhan masyarakat dan berupaya memberikan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun dampak dari pemekaran desa ini terlihat pada meningkatnya profesionalitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta terciptanya pelayanan publik yang lebih berkualitas, cepat, dan tepat. Selain itu, pemekaran desa juga mendorong terciptanya kepastian hukum, rasa aman, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif maupun permasalahan lainnya, sehingga hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi semakin harmonis dan kondusif.

5. Empathy (Empati)

Teori ini menjelaskan bahwa sikap pemerintah terhadap masyarakat sangat ramah, sopan, dan membantu, terutama bagi lanjut usia (lansia) dan

penyandang disabilitas. Aparat desa memberikan pelayanan yang humanis dengan menunjukkan kepedulian dan empati dalam memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pemerintah desa tidak hanya memberikan pelayanan secara administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dalam setiap interaksi dengan warga. Pemerintah desa memberikan perhatian khusus kepada warga rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, agar mereka tetap mendapatkan pelayanan yang layak dan mudah diakses. Selain itu, aparat desa menerima keluhan warga secara langsung tanpa sikap diskriminatif, serta berupaya memberikan solusi secara cepat dan tepat. Setiap keluhan masyarakat ditanggapi dengan penuh tanggung jawab tanpa adanya penundaan waktu, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan. Sikap ini turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah desa. Adapun dampak dari pemekaran desa ini terlihat pada meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat merasa lebih mudah mengakses layanan serta mendapatkan perlakuan yang adil tanpa perbedaan..

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara di Desa Pusian Induk, Desa Pusian Barat, dan Desa Pusian Selatan mengenai dampak pemekaran desa terhadap kualitas pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan tersebut terlihat dari semakin meratanya pembangunan infrastruktur, tersedianya fasilitas pelayanan yang lebih memadai, serta pelayanan pemerintah yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa di Desa Pusian Induk dan Desa Pusian Barat terjadi peningkatan pelayanan yang cukup signifikan, sementara di Desa Pusian Selatan pelayanan publik dinilai telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala, khususnya terkait aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Sebelum pemekaran, pelayanan publik cenderung kurang efektif karena luasnya wilayah, jumlah penduduk yang banyak, keterbatasan aparatur, serta akses masyarakat yang relatif jauh dari pusat pelayanan. Namun, setelah pemekaran, pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah dijangkau, dan lebih fokus pada kebutuhan masyarakat. Meskipun jenis pelayanan yang diberikan pada dasarnya tidak mengalami perubahan, kualitas pelayanan mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam ketepatan sasaran bantuan sosial, efektivitas pembangunan, serta meningkatnya responsivitas aparatur desa.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik setelah pemekaran desa mencapai angka 85% yang termasuk dalam kategori sangat baik, serta menunjukkan peningkatan dibandingkan penelitian sebelumnya yang berada pada kisaran 80–84%. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga didukung oleh mulai berkembangnya berbagai inovasi pelayanan, seperti layanan pengaduan

masyarakat, program pemberdayaan, dan pelayanan berbasis digital.

Dengan demikian, pemekaran desa diwilayah Pusian Induk, Pusian Barat, dan Pusian Selatan dapat dinyatakan berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun demikian, aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, pemerintah desa diharapkan dapat terus mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang telah dicapai setelah pemekaran desa. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia, meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur desa, serta mengembangkan inovasi pelayanan, termasuk pelayanan berbasis digital, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan merata.

Selain itu, pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, lembaga desa, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Hal ini penting untuk mengatasi berbagai kendala yang masih ditemukan, khususnya terkait aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Pemekaran desa juga perlu terus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperluas jangkauan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh

masyarakat dimasing-masing wilayah desa.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan jumlah responden yang lebih besar atau pendekatan penelitian yang lebih luas, serta mengkaji dampak pemekaran desa dari aspek lain seperti sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak pemekaran desa

Daftar Pustaka

- Arlin, D. (2025). Analisis Peran Guru Ppkn Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas Vii Di Smp Negeri 07 Sekadau Hulu (Doctoral Dissertation, Stkip Persada Khatulistiwa).
- Duka, M. I. (2022). Dampak Pemekaran Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Terhadap Perubahan Sosial (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Hayati, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh).
- Muhammad, I. (2024). Dampak Pemekaran Pekon Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Risapni, O. A. (2024). Dampak Pemekaran Desa Terhadap

- Kesejahteraan Masyarakat Desa Koto Mesjid Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sapara, L. A., & Eprilianto, D. F. (2024). Kajian Pemekaran Desa Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Persiapan Ngandel Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 727-738.
- Siska, O. (2024). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Desa Suka Negeri Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Telung, U., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2020). Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Desa Raringis, Eksekutif, 3 (3) *Jurnal :*
- Arianto, A., Adhayanto, O., & Handrisal, H. (2021). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna). *Student Online Journal (Soj) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2 (1), 10-15.
- Aziz, A. F. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Provinsi Banten. *Thejournalish: Social And Government*, 5 (3), 298-305.
- Hermawati, N. (2019). Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 16 (1), 1-15.
- Setyadi, A., Puspita, S., Salmah, N. N. A., & Najib, M. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Tipe Kepribadian Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 21(1), 117-129.
- Susilo, A., & Firmansyah, A. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kepala Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(3), 104-111.
- Sofia, A. P., & Sutanto, H. (2023). Dampak Pemekaran Desa Pada Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung. *Journal Of Economics And Business*, 9 (1), 14-22.
- Sitorus, M. (2022). Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empaty Dan Tangilbes Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai). *Jurnal Borneo Administrator* 5 (1).
- Wijaya, A., Adnan, A. A., & Sundari, S. (2024). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pengelolaan Potensi Daerah Di Desa Buntu Buangin. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 12 (3), 301-309.
- Hayati, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue

Barat, Kabupaten Simeulue,
Provinsi Aceh).